

## ABSTRAK

Dalam perjanjian bagi hasil ikan di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, pemilik tambak ikan berkewajiban menyediakan benih ikan dan pakan ikan. Untuk jenis ikan yang dipelihara di dalam tambak adalah ikan bandeng, nila dan kerapu lumpur. Hal ini dikarenakan sumber air yang digunakan untuk mengusahakan tambak adalah air payau, sehingga dipilih ikan-ikan yang biasa hidup di air payau. Luas rata-rata tambak ikan yang ada di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah adalah 900 M<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 30 M x lebar 30M. Luas ini didasarkan atas perhitungan masyarakat di Kecamatan Sungai Kunyit bahwa 900 M<sup>2</sup> adalah 1 (satu) borong. Dalam 1 (satu) tambak ikan biasanya bisa menghasilkan panen ikan rata-rata mencapai 500 kg. Untuk jangka waktu panen ikan umumnya 2 bulan sekali. Hasil panen ikan tergantung dari cara pemeliharaan dan pemberian pakan ikan yang dilakukan oleh pemelihara tambak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Mengapa Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Ikan Antara Pemelihara Dengan Pemilik Tambak Tidak Dilakukan Sesuai Yang Telah Disepakati??. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi , faktor penyebab pemelihara tambak, akibat hukum dan upaya hukum tentang mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan antara pemilik tambak ikan dengan pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

Dari pengolahan data, maka dapat disimpulkan, bahwa perjanjian bagi hasil ikan antara pemilik tambak ikan dengan pemelihara tambak dilakukan secara lisan dan tertulis tanpa diketahui oleh perangkat desa atau pihak lain sebagai saksi, dan di bawah akta notaris karena saling percaya dari pemilik tambak terhadap pemelihara tambak untuk mengusahakan tambak ikannya; bahwa faktor penyebab pemelihara tambak wanprestasi terhadap pemilik tambak ikan dalam perjanjian bagi hasil ikan dikarenakan sistem bagi hasil yang diterima oleh pemelihara tambak ikan si pakai untuk keperluan yang mendesak untuk sehari-hari tidak mencukupi untuk biaya hidup bagi keluarga pemelihara tambak. Di samping itu, pemilik tambak ikan tidak pernah atau jarang mengecek tambaknya karena dipercayakan secara penuh kepada pemelihara; akibat hukum bagi pemelihara tambak yang wanprestasi terhadap pemilik tambak ikan dalam perjanjian bagi hasil ikan adalah membayar ganti rugi, dan pembatalan perjanjian; dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik tambak ikan terhadap pemelihara tambak yang wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil ikan adalah dengan cara musyawarah kekeluargaan karena pemilik tambak ikan masih menjaga hubungan baik dengan pemelihara tambak yang sebagian besar masih ada hubungan keluarga dan merupakan penduduk setempat yang sudah lama dikenal oleh pemilik tambak ikan.

***Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Tambak Ikan, Wanprestasi***

## ABSTRACT

In the fish production sharing agreement in Semudun Village, Sungai Kunyit Subdistrict, Mempawah Regency, the fish pond owner is obliged to provide fish seeds and fish feed. The types of fish kept in ponds are milkfish, tilapia and mud grouper. This is because the source of water used to cultivate the pond is brackish water, so the fish that usually live in brackish water are chosen. The average area of fish ponds in Semudun Village, Sungai Kunyit Subdistrict, Mempawah Regency is 900 M<sup>2</sup> with a length of 30 M x width 30 M. This area is based on the calculation of the community in Sungai Kunyit District that 900 M<sup>2</sup> is 1 (one) wholesale. In 1 (one) fish pond, it can usually produce an average fish harvest of 500 kg. The fish harvest period is generally every 2 months. The yield of fish depends on the way the fish are kept and fed by the pond keeper. The formulation of the problem in this research is why is the implementation of the fishpond production sharing agreement between the maintainer and the owner of the pond not carried out according to what has been agreed? The purpose of this study was to obtain data and information, factors causing pond keeper, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of a fish production sharing agreement between fish pond owners and pond keeper in Semudun Village, Sungai Kunyit Subdistrict, Mempawah Regency.

Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense and examine how the law works in a society.

From the data processing, it can be concluded that the fish production sharing agreement between the fish pond owner and the pond keeper is carried out verbally and in writing without being known by the village apparatus or other parties as witnesses, and under a notarial deed because of mutual trust from the pond owner to the pond keeper. to operate the fish pond; that the factor causing the pond keeper to default on the fish pond owner in the fish production sharing agreement is because the profit sharing system received by the fish pond keeper for urgent daily needs is not sufficient for living expenses for the pond keeper's family. In addition, fish pond owners never or rarely check their ponds because they are fully entrusted to the caretaker; the legal consequences for pond keeper who default on the fish pond owner in the fish production sharing agreement are paying compensation, and canceling the agreement; and efforts that can be made by fish pond owners to pond keeper who are in default in the fish production sharing agreement are by means of kinship deliberation because fish pond owners still maintain good relations with pond keeper, most of whom still have family relations and are local residents who have long been known by the owner of the fish pond.

***Keywords: Profit Sharing Agreement, Fish Farm, Default***